



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PROVINSI PAPUA BARAT

**BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN
TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PROVINSI PAPUA BARAT**

KATA PENGANTAR

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah memberikan pelajaran berharga berupa kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan munculnya pandemi di masa mendatang. Berbagai langkah dan strategi Pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam mengatasi pandemi Covid-19, melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, dan kebijakan dukungan stimulus sebagai bantalan perekonomian bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah serta dukungan stimulus yang diberikan bagi perekonomian dan masyarakat terdampak menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih tumbuh kuat pada angka 5,44% pada Q2 2022, dan dengan inflasi yang masih terkendali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat perekonomiannya telah kembali ke level prapandemi sejak tahun 2021.

Salah satu pilar penting dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional tersebut ditopang oleh reformasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan TKD tahun 2022, selain terus mengemban peran utama dalam mendukung berjalannya pemerintahan di daerah, juga untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis TKD lainnya.

Namun demikian, belum selesai dengan tantangan Pandemi Covid-19, dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara, telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah bergerak cepat dalam memberikan respon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Indonesia tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, namun juga mampu menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal sebagai fondasi bagi perekonomian di tahun 2023.

Berdasarkan kondisi tersebut, tahun 2023 menjadi sebuah *milestone* untuk pemulihan ekonomi secara cepat, membangun kembali daya tahan ekonomi, serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan. Meskipun demikian, kewaspadaan harus tetap dijaga karena risiko

munculnya varian baru.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang dihadapkan pada ketidakpastian global dan kenaikan *cost of fund* yang luar biasa cepat dan tinggi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan fiskal 2023 yang dimanifestasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 yang mengambil tema “Optimis dan Tetap Waspada”. Kondisi perekonomian di tahun 2023 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional. Untuk itu, APBN tahun 2023 difokuskan untuk terus mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara di tahun 2023 untuk mengendalikan inflasi, penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial, dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas.

Kemudian, kebijakan TKD tahun 2023 yang juga telah berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), secara umum diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui:
 - a. pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha);
 - b. melakukan *Integrated funding* (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)); dan
 - c. pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, anggaran TKD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp814,7 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp70,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis TKD ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap buku ini dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengingat pentingnya tahun 2023 dalam rangka melanjutkan upaya pemulihan ekonomi nasional, maka saya juga berharap kepada segenap Pemerintah Daerah untuk segera dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakannya. Perkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintahan Daerah lainnya, serta selalu "Optimis dan Tetap Waspada".

Jakarta, 22 November 2022

MENTERI KEUANGAN,



SRI MULYANI INDRAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2023	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI PAPUA BARAT	17
1. PROVINSI PAPUA BARAT	18
2. KAB. FAK FAK	19
3. KAB. MANOKWARI	20
4. KAB. SORONG	21
5. KOTA SORONG	22
6. KAB. RAJA AMPAT	23
7. KAB. SORONG SELATAN	24
8. KAB. TELUK BINTUNI	25
9. KAB. TELUK WONDAMA	26
10. KAB. KAIMANA	27
11. KAB. MAYBRAT	28
12. KAB. TAMBRAUW	29
13. KAB. MANOKWARI SELATAN	30
14. KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	31
TIM PENYUSUN BUKU	32

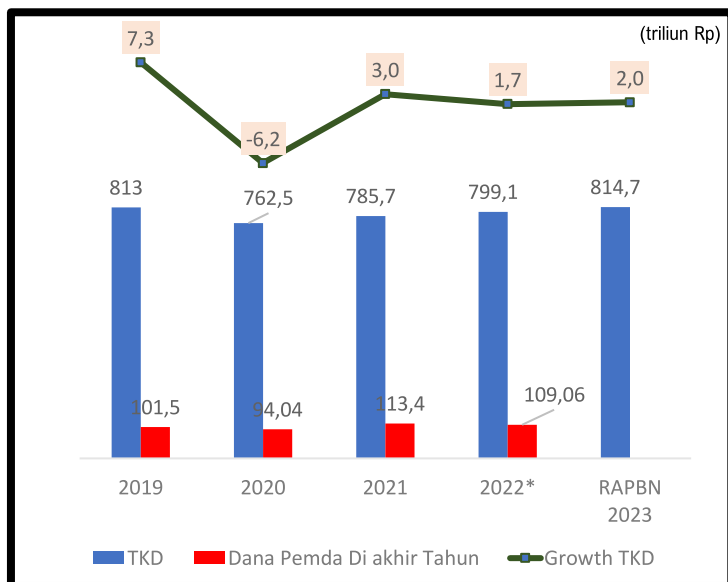


RANGKUMAN KEBIJAKAN TKD TA 2023



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2023

Diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah



*) Data simpanan pemda akhir tahun 2022 dihitung dengan menggunakan estimasi

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah TA 2023 antara lain:

1. Meningkatkan **sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja** pusat dan daerah.
2. **Memperkuat kualitas pengelolaan TKD** yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan **kemampuan perpajakan daerah (local taxing power)** dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong **pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan** melalui:
 - a) pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU);
 - b) melakukan *Integrated funding* (kerja sama pembangunan antar daerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan APBD); dan
 - c) pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2023

(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	Realisasi			Perpres 98/2022	RUU APBN (Nota Keuangan)	RUU APBN (Penyesuaian)
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1. Dana Bagi Hasil	103.98	93.91	117.16	140.43	136.26	136.26
2. Dana Alokasi Umum	420.91	381.61	377.79	378.00	396.00	396.00
- DAU tidak ditentukan penggunaannya			377.79	378.00	286.77	286.77
- DAU ditentukan penggunaannya :					109.23	109.23
▪ Penggajian Formasi PPPK					25.74	25.74
▪ Pendanaan Kelurahan					1.67	1.67
▪ Pendanaan Layanan Publik					81.82	81.82
3. Dana Alokasi Khusus	186.40	176.58	184.64	189.59	182.90	185.80
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	64.17	50.18	57.07	60.87	50.52	53.42
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	122.23	126.40	127.57	128.72	130.30	130.30
c. Hibah ke Daerah	-	-	-	-	2.08	2.08
4. Dana Otonomi Khusus	20.98	19.56	19.48	20.44	17.24	17.24
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.20	1.32	1.32	1.32	1.32	1.42
6. Dana Desa	69.81	71.10	71.85	68.00	70.00	70.00
7. Insentif Fiskal	9.69	18.46	13.46	7.00	8.00	8.00
TOTAL TKD	812.97	762.54	785.70	804.78	811.72	814.72

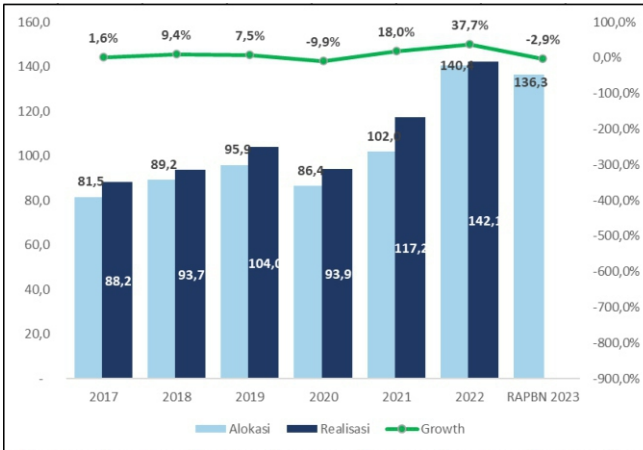
Terdapat **penambahan** pagu DAK Fisik TA 2023 sebesar **Rp2,9 T**, dari semula Rp50,52 T (NK) **menjadi Rp53,42 T**.



PERKEMBANGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL DAN KEBIJAKAN TA 2023



PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DBH



Realisasi tahun 2022 menggunakan outlook realisasi sampai dengan akhir TA 2022

Alokasi dan realisasi DBH setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang menurun sejalan dengan realisasi penerimaan negara yang menurun sebagai dampak pandemi covid-19.



Kebijakan 2023

- ❑ Melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT dan DBH DR) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan.
- ❑ Mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah.
- ❑ Meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan perkiraan realisasi T-1 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022.
- ❑ Pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
- ❑ Penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit, antara lain untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah.
- ❑ Memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH.

FORMULASI PERHITUNGAN ALOKASI DBH



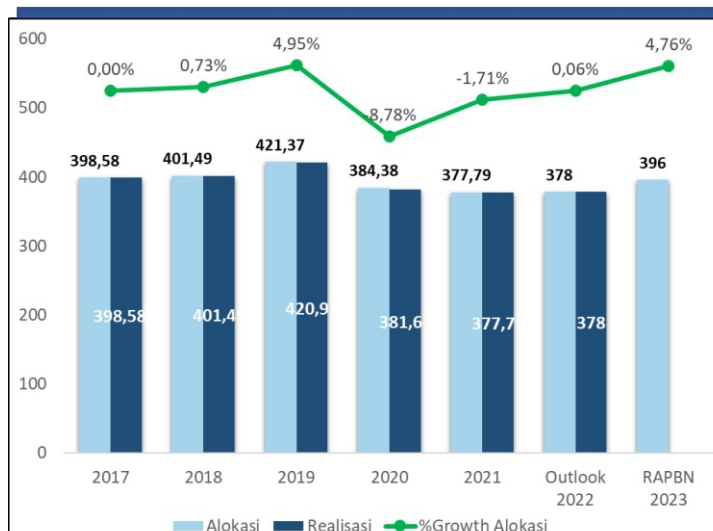
*) Alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah dengan capaian kinerja yang tidak maksimal.



PERKEMBANGAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM DAN KEBIJAKAN TA 2023



PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DAU



Kebijakan 2023

- Melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU;
- Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan untuk Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

Target Output:

- Pengangkatan **1.347.828 formasi PPPK** tahun 2022 dan 2023 meliputi PPPK Guru, PPPK Nakes dan PPPK Teknis
- Dukungan Pendanaan kepada **8.506 Kelurahan** untuk peningkatan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- Peningkatan layanan publik daerah bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang didanai dari DAU:

NO.	BIDANG	JUMLAH DAU EARMARKED
1.	PENDIDIKAN	Rp40.06 triliun
2.	KESEHATAN	Rp25.84 triliun
3.	PEKERJAAN UMUM	Rp15.91 triliun

FORMULA PERHITUNGAN ALOKASI DAU TA 2023

$$DAU = \text{Celah Fiskal (CF)}$$

- Pagu DAU Nasional dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab/Kota dengan **proporsi 14,1 : 85,9**;
- Pagu DAU Provinsi dan Kab./Kota dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab./Kota, per kelompok klaster : Sumatera, Jawa - Bali, Kalimantan - Sulawesi, dan Nusa Tenggara - Maluku - Papua, berdasarkan **Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah**;
- Perhitungan Alokasi per Daerah dilakukan dalam masing2 Kelompok**, yaitu Kelompok:
 - Provinsi Sumatera - Kab.Kota Sumatera
 - Provinsi Jawa-Bali - Kab./Kota Jawa-Bali
 - Provinsi Kal-Sul - Kab./Kota Kal-Sul
 - Provinsi Nusra-Mal-Pap - Kab./Kota Nusra-Mal-Pap

- Unit Cost** masing-masing Bidang Layanan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, untuk masing2 Kelompok dihitung dengan rumus:

Rerata Belanja Bidang 3 tahun dibagi rerata target layanan 3 tahun

BIDANG	TARGET LAYANAN
Bid. Pendidikan	Jumlah Siswa*
Bid. Kesehatan	Jumlah Penduduk
Bid. Pekerjaan Umum	Panjang Jalan*
Bid. Layanan Umum	Jumlah Penduduk

- Faktor Penyesuaian (FP)**, terdiri dari:
 - IKK
 - Density (JP/LW Darat)
 - Daerah Kepulauan (LW Laut)
 - Daerah Ketahanan Pangan (Pertanian & perikanan)
 - Daerah Pariwisata
 - Daerah Konservasi Hutan

- Kebutuhan Fiskal** dihitung dengan rumus:

$$((\sum \text{Unit Cost} \times \text{target layanan}) \times \text{FP}) + \text{Belanja Pegawai}$$

- Potensi Pendapatan**, dihitung dengan rumus:

$$(\alpha_1 \times \text{Potensi PAD}) + (\alpha_2 \times \text{Alokasi DBH}) + (\alpha_3 \times \text{Alokasi DAK NF})$$

- Celah Fiskal (CF)** dihitung dengan rumus:

$$\text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Potensi Pendapatan}$$

- Alokasi per Daerah** dihitung dengan rumus:

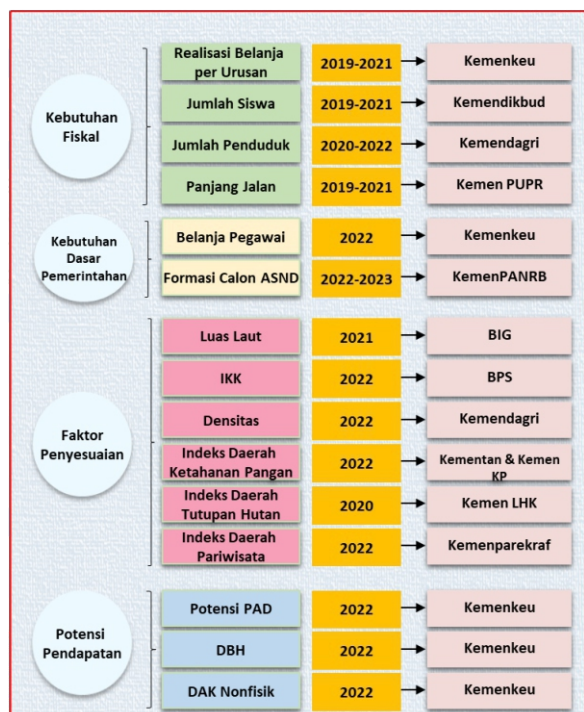
$$(\text{CF Daerah} / \sum \text{CF daerah dalam Kelompok}) \times \text{Pagu Kelompok}$$



PERHITUNGAN DAU TA 2023



DATA DASAR DAU TA. 2023



URAIAN	RAPBN 2023	
PAGU DAU	396.000,00	
ALOKASI PAGU DAU	PROV.	KAB./KOTA
▪ PROPORSI PEMBAGIAN PAGU DAU	14,1 %	85,9 %
BOBOT VARIABEL PAGU KELOMPOK		
▪ JUMLAH PENDUDUK	50,0%	50,0%
▪ LUAS WILAYAH	50,0%	50,0%
JUMLAH PAGU KELOMPOK (Miliar)		
▪ SUMATERA	16.276,02	91.419,79
▪ JAWA BALI	14.297,20	116.423,89
▪ KALIMANTAN - SULAWESI	15.208,98	77.073,71
▪ NUSRA - MALUKU - PAPUA	10.053,79	55.246,62
BOBOT FAKTOR PENYESUAIAN		
▪ INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	50%	50%
▪ INDEKS DENSITAS	5%	5%
▪ INDEKS KETAHANAN PANGAN	10%	10%
▪ INDEKS PARIWISATA	10%	10%
▪ INDEKS TUTUPAN HUTAN	15%	15%
▪ INDEKS LUAS LAUT (KEPULAUAN)	10%	10%
VARIABEL POTENSI PENDAPATAN		
▪ Potensi PAD	60%	60%
▪ DBH	100%	100%
▪ DAK Nonfisik	80%	80%

URAIAN	APBN 2022	RAPBN 2023
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,22596	0,16658
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14863	0,13403

ALOKASI DAU TA. 2022

- Pagu DAU TA. 2022 sebesar Rp378,0 Triliun, seluruh Daerah tidak ada yang mengalami penurunan dibandingkan alokasi TA. 2021 pasca penyesuaian sebagaimana diatur dalam PMK 17/PMK.07/2021.
- Berdasarkan Perpres No. 104 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 98 Tahun 2022, terdapat 15 Provinsi dan 278 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan alokasi dibandingkan dengan alokasi DAU TA. 2021 dengan capaian indeks Theil sebesar 0,14863

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2023:

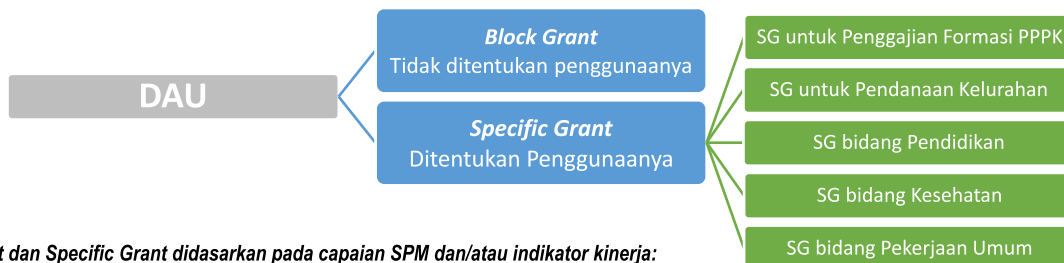
- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2023 berbeda dengan DAU TA. 2022, oleh karenanya untuk meminimalisir dampak perubahan terhadap alokasi, dan juga mengantisipasi tambahan beban Pemerintah Daerah seperti pengangkatan dan penggajian PPPK maka dilakukan penyesuaian dengan memberikan kenaikan alokasi **minimal sebesar 3.5% dari alokasi TA. 2022.**
- Seluruh Daerah mengalami peningkatan alokasi dibandingkan alokasi TA. 2022, kecuali untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang disebabkan oleh karena pengalihan sebagian alokasi DAU sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah.
- Indeks Theil DAU TA. 2022 vs DAU TA 2023 :
 - DAU TA. 2022, sebesar **0,14863**; dan
 - Exercise* DAU TA 2023, menjadi **0,13403**
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUNAAN DAU

Yang tidak ditentukan penggunaannya dan yang ditentukan penggunaannya



Penentuan porsi Block Grant dan Specific Grant didasarkan pada capaian SPM dan/atau indikator kinerja:

- Daerah dengan kinerja baik → lebih besar porsi Block Grant
- Daerah dengan kinerja kurang → lebih besar porsi Specific Grant

DAU Earmark Grant digunakan untuk kegiatan yang menunjang capaian SPM/Indikator kinerja

DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (SPECIFIC GRANT)

LAYANAN UMUM	PENDIDIKAN	KESEHATAN	PEKERJAAN UMUM
- Porsi Specific Grant berdasarkan alokasi Pendanaan Kelurahan dan Kebutuhan Penggajian PPPK - Digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Penggajian PPPK	Porsi Specific Grant berdasarkan: - Indeks Kinerja Layanan Pendidikan, dihitung berdasarkan data: - Rata-rata Lama Sekolah (RLS), - Angka Partisipasi Murni (APM), - Tingkat Penyelesaian Sekolah (TPS), - Persentase Guru Layak, - Rasio Kelas Layak, - Peta Mutu Pendidikan (PMP)	Porsi Specific Grant berdasarkan: - Indeks Kinerja Layanan Kesehatan, dihitung berdasarkan data: - Usia Harapan Hidup, - Persalinan ditolong tenaga kesehatan, - Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, dan - Balita dengan gizi normal	Porsi Specific Grant berdasarkan: - Indeks Kinerja Layanan Pekerjaan Umum, dihitung berdasarkan data: - Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak, - Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak, - Kondisi Jalan Mantap, - Rasio Elektrifikasi, dan - Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet

- Penentuan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Penggajian PPPK dan Pendanaan Kelurahan didasarkan pada jumlah Formasi PPPK Tahun 2022 dan 2023, dan jumlah Kelurahan masing-masing Daerah.
- Penentuan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk peningkatan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum didasarkan pada tingkat capaian kinerja layanan bidang masing-masing daerah

NO.	DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (Millar Rp)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (Millar Rp)						TOTAL DAU
			PENGGAJIAN PPPK	PENDANAAN KELURAHAN	PENDIDIKAN	KESEHATAN	PEKERJAAN UMUM	TOTAL	
I	KLASTER Prov.	41.841,16	4.483,68	22,18	5.768,63	2.056,28	1.664,07	13.994,84	55.836,00
1	SUMATERA	11.988,38	1.479,32	0,00	1.833,10	575,22	400,01	4.287,64	16.276,02
2	JAWA BALI	11.930,57	1.051,69	22,18	1.048,38	211,92	32,46	2.366,63	14.297,20
3	KALIMANTAN SULAWESI	10.583,95	1.465,72	0,00	1.833,07	733,66	592,59	4.625,04	15.208,98
4	NUSRA MALUKU PAPUA	7.338,25	486,95	0,00	1.054,09	535,48	639,02	2.715,54	10.053,79
II	KLASTER KAB./KOTA	244.926,60	21.258,32	1.647,80	34.294,85	23.787,25	14.249,19	95.237,40	340.164,00
1	SUMATERA	65.057,35	5.471,31	471,40	9.389,65	6.652,01	4.378,06	26.362,43	91.419,79
2	JAWA BALI	87.745,32	8.456,27	523,00	11.055,63	6.407,53	2.236,13	28.678,56	116.423,89
3	KALIMANTAN SULAWESI	53.437,80	4.554,35	487,40	8.537,78	5.844,93	4.211,45	23.635,91	77.073,71
4	NUSRA MALUKU PAPUA	38.686,12	2.776,38	166,00	5.311,79	4.882,79	3.423,55	16.560,50	55.246,62
NASIONAL		286.767,75	25.742,00	1.669,98	40.063,48	25.843,53	15.913,26	109.232,25	396.000,00

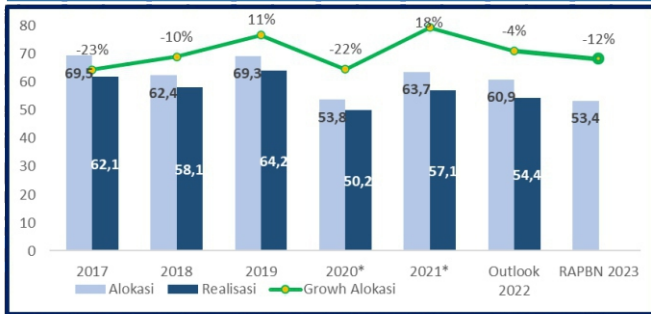


PERKEMBANGAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN KEBIJAKAN TA 2023



mendana program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah.

PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DAK FISIK



- Mendukung Peningkatan Kualitas SDM** **TEMATIK DAK FISIK TA 2023**
- Mendukung Konektivitas Daerah**
- Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pemb. Infrastruktur**
 - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
 - Tematik Penanganan Kawasan Kumuh
 - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi
- Mendukung Ketahanan Pangan**
 - Tematik Pengembangan Food Estate
 - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan



Kebijakan 2023

- Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:
 - Pencapaian Prioritas Nasional (PN)
 - Percepatan pembangunan daerah
 - Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah,
 - Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
- Melanjutkan kebijakan TA 2022
 - Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome optimal.
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK
 - Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan.
 - Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

DAK FISIK TA 2023 – TEMATIK dan BIDANG

DAK Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Bidang Pendidikan (termasuk Perpustakaan)**
Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- Bidang Kesehatan (termasuk KB)**
- Bidang Air Minum**
Fokus pada dukungan MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Bidang Sanitasi**

DAK Mendukung Konektivitas Daerah

- Bidang Jalan**
Mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

DAK Mendukung Ketahanan Pangan

4. DAK Tematik Pengembangan Food Estate

- Pertanian
- Irigasi
- Jalan
- Kehutanan
- DAK Tematik Pengembangan Food Estate difokuskan pada 5 Lokasi FE dengan fokus kepada tanaman pangan dan hortikultura

DAK Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

- 1. DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas**
Pariwisata IKM UMKM Perdagangan Lingkungan Hidup Jalan
- 2. DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh****
**DAK Permukiman Terintegrasi
Air Minum Sanitasi Perkumuh
- 3. DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi**
Transportasi Perdesaan Transportasi Perairan Jalan Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)

5. DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

- Pertanian
- Irigasi
- Kelautan Perikanan
- Jalan
- DAK Tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan ditujukan untuk lokasi selain FE dengan fokus pertanian, perikanan dan hewani

Target Output (antara lain)

- PENDIDIKAN**
 - Revitalisasi Sekolah **10.940 SP**
 - Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan **45 Unit**
- KESEHATAN**
 - Penyediaan Alat Antropometri **4.965 Puskesmas**
 - Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB **1.017 Unit**
 - Pengadaan BKB Kit Stunting **10.280 Unit**
- JALAN**
 - Peningkatan kemandapan jalan pada Ruas di **328 Kab/Kota Dan 31 Provinsi**
- AIR MINUM**
 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan **94.036 SR**
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan **47.079 SR**
- IRIGASI**
 - Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi **48.564 Ha**
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi **111.647 Ha**
 - Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **14,22 Km**
- PERTANIAN**
 - Pembangunan Jalan Pertanian **2.589 Unit**
 - Pembangunan Olahan Pakan Ternak **495 Unit**
- KELAUTAN DAN PERIKANAN**
 - Pembangunan/Rehabilitasi **53 Pelabuhan Perikanan**
 - Pembangunan/Rehabilitasi **97 Unit Pembenihan**



POSTUR DAK FISIK TA 2023



No	Bidang DAK Fisik	APBN 2022	RAPBN 2023 (Nota Keuangan)	RAPBN 2023 (Kesepakatan)	Selisih
1	2	3	4	5	(5-4)
1	Pendidikan	18.348,53	15.220,30	15.820,30	600
2	Kesehatan dan KB	15.774,28	13.100,00	13.400,00	300
3	Jalan	12.165,17	10.502,62	12.617,76	2.115,14
4	Air Minum	3.000,00	1.951,80	1.951,8	-
5	Sanitasi	2.000,00	1.569,50	1.569,50	-
6	Perumahan dan Pemukiman	1.000,00	428,35	160,65	(267,69)
7	Irigasi	1.500,00	1.600,00	1.688,94	88,94
8	Pertanian	2.200,00	2.300,05	2.363,65	63,61
9	Kelautan dan Perikanan	1.134,88	1.234,90	1.234,90	-
10	Perdagangan	200,00	150,00	150,00	-
11	Industri Kecil dan Menengah	753,23	450,00	450,00	-
12	Pariwisata	431,88	450,00	450,00	-
13	Lingkungan Hidup	350,00	154,96	154,96	-
14	Transportasi Perairan	530,70	440,00	440,00	-
15	Transportasi Perdesaan	1.000,00	750,00	750,00	-
16	Kehutanan	350,00	32,00	32,00	-
17	Usaha Mikro Kecil & Menengah	135,32	100,00	100,00	-
18	Infrastruktur Energi Terbarukan	-	88,00	88,00	-
Total		60.874,00	50.522,46	53.422,46	2.900,00

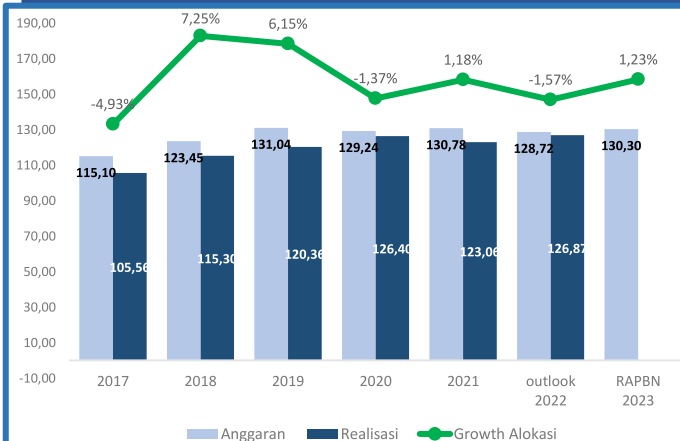
- Terdapat **penambahan** pagu DAK Fisik TA 2023 sebesar **Rp2,9 T**, dari semula Rp50,52 T (NK) **menjadi Rp53,42 T**
- Pagu DAK Fisik TA 2023 **lebih rendah Rp7,4 T (turun 12%)** dibandingkan TA 2022.
- Pagu DAK Fisik pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar **Rp29,2 T** sudah menjadi bagian kebijakan **mandatory spending** Pendidikan dan Kesehatan.
- Bidang DAK Fisik lainnya sebesar **Rp24,2 T (45%)** dibagi pada berbagai bidang sesuai prioritas RKP dan besarnya kebutuhan daerah
- Penambahan 1 **bidang baru "Infrastruktur Energi Terbarukan"**.



PERKEMBANGAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DAN KEBIJAKAN TA 2023



PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI



- Rata-rata persentase penyaluran DAK Nonfisik adalah sebesar 95,7%
- Realisasi tahun 2020 tinggi karena kebijakan relaksasi penyaluran sesuai PMK No. 101/PMK.07/2020
- Sampai dengan 23 Agustus, penyaluran DAK Nonfisik TA 2022 adalah sebesar Rp74,7T (58%)



Kebijakan 2023

- Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
- Memperkuat kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis *unit cost* majemuk untuk dana BOSP, serta perluasan target *output* tunjangan guru.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer
- Memperkuat kebijakan DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Target Output 2023

PENDIDIKAN

- BOS untuk 43,6 juta siswa
- BOP PAUD untuk 6,2 jt peserta didik
- TPG untuk 1,1 juta guru
- Tamsil untuk 527rb guru
- TKG untuk 43rb guru
- BOP Kesetaraan untuk 806 rb peserta didik
- BOP MTB untuk 115 Museum dan 23 Taman Budaya

KESEHATAN

- BOK untuk 9,9rb puskesmas
- BOKB untuk 6,2rb balai penyuluhan

EKONOMI

- Pelayanan kepariwisataan untuk 32rb peserta
- Dana PK2UKM untuk 47rb peserta pelatihan
- Dana FPM untuk 115rb pelaku usaha
- Dana PPPA untuk 275 daerah
- Dana PK2SIKM untuk 68 Sentra IKM
- Dana KPP untuk 1.236 kelompok masyarakat
- Dana BLPS untuk 1 Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2023

No	Jenis Dana	APBN 2022	RAPBN 2023 (Nota Keuangan)	Penyesuaian RAPBN 2023 (Panja TKD)
1	2	3	4	5
1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59,385.40	59,083.89	59,083.89
	a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54,108.30	53,605.00	53,569.28
	b. BOP Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	4,254.85	3,952.39	4,047.39
	c. BOP Kesetaraan	1,022.24	1,526.50	1,467.22
2	Tunjangan Guru ASN Daerah	55,326.04	53,594.26	53,594.26
	a. Tunjangan Profesi Guru ASND	51,990.47	50,450.84	50,450.84
	b. Tambahan Penghasilan Guru ASND	1,684.28	1,476.33	1,476.33
	c. Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1,651.29	1,667.08	1,667.08
3	BOP Museum dan Taman Budaya	167.60	169.98	169.98
4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		12,878.67	12,878.67
	a. BOK Dinas	9,933.13	4,778.01	4,778.01
	b. BOK Puskesmas		8,100.66	8,100.66
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2,759.77	3,239.30	3,239.30
6	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	225.00	250.00	250.00
7	Dana Pelayanan Kepariwisata	127.90	133.30	133.30
8	Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	100.00	65.83	65.83
9	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak	120.00	132.00	132.00
10	Dana Fasilitas Penanaman Modal	225.00	250.00	250.00
11	Dana Ketahanan Pangan & Pertanian	200.00	300.05	300.05
12	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	150.00	200.00	200.00
TOTAL		128,719.84	130,297.27	130,297.27

- Penggabungan untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Dana TPG, Tamsil Guru dan TKG di Daerah Khusus menjadi Dana Tunjangan Guru ASND untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOSP dan Tunjangan Guru.
- Pemisahan untuk dana BOK menjadi Dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran.
- Terdapat usulan perubahan rincian dana BOSP, berupa perubahan target sasaran untuk BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan dikarenakan *update* data Dapodik *cutoff* 31 Agustus 2022.



TARGET OUTPUT DAK NONFISIK TA 2023



Bantuan Operasional Sekolah
untuk 43.659.191 siswa/ 44.264 Sekolah Kinerja



Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UMK
untuk 53.700 Peserta Pelatihan



BOP PAUD
untuk 6.215.513 peserta didik/3.646 PAUD Penggerak



Bantuan BLPS
untuk 1 Instalasi PSEL



BOP Pendidikan Kesetaraan
untuk 806.010 peserta didik/ 1.199 satdik



Dana Pelayanan Kepariwisata untuk 31.320 peserta pelatihan



Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah untuk 998.824 guru PNSD dan 110.429 PPPK



Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
untuk 275 daerah

Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah untuk 36.494 guru PNSD dan 6.712 PPPK



Dana Fasilitas Penanaman Modal
untuk bimbingan/sosialisasi kepada 115,368 pelaku usaha

Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah untuk 161.594 guru PNSD dan 365.786 PPPK



Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
untuk 1.255 kelompok masyarakat



BOP Museum & Taman Budaya
untuk 115 Museum dan 23 Taman Budaya



PK2SIKM
untuk 68 sentra IKM



Bantuan Operasional Kesehatan
untuk 9.977 puskesmas



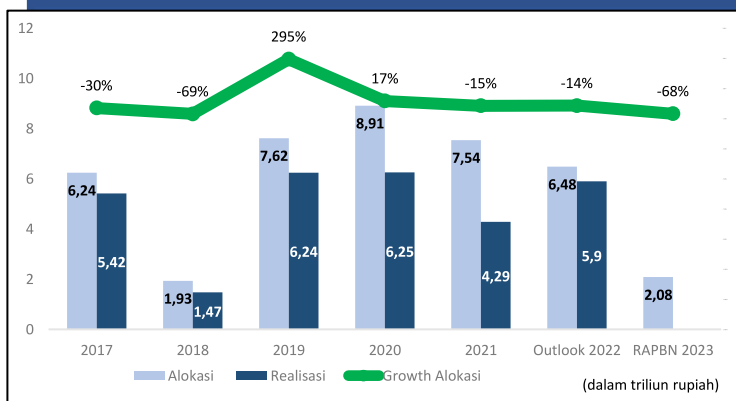
Bantuan Operasional KB
untuk 6.239 Balai Penyuluhan KB



PERKEMBANGAN ALOKASI HIBAH DAERAH DAN KEBIJAKAN TA 2023



PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI HIBAH DAERAH



- Pada periode tahun 2017-2023, alokasi hibah daerah berfluktuasi mengikuti proyeksi kemajuan pekerjaan sesuai *Loan/Grant Agreement* serta kemampuan pelaksanaan oleh pemda.
- Sampai dengan 31 Agustus 2022, penyaluran hibah daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1,69T (26%).



Kebijakan 2023

- Mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.
- Sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah.
- Memperkuat peran Hibah kepada Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian.
- Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan *output*.

Target Output 2023

Diantaranya adalah :

SANITASI

- Pembangunan sanitasi layak dan aman berupa tangki septik pada 25.000 Rumah Terlayani (RT)

AIR MINUM

- Pembangunan Sambungan Rumah (SR) air minum sebanyak 214.464 SR

PERHUBUNGAN

- Pembangunan MRT Jkt Fase 2A sepanjang ± 5,8 km
- Penanganan jalan sepanjang 421,88 km

LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah sebesar 3 juta ton Co2eq, area hutan

PERTANIAN

- Pelatihan petani sebanyak 92.775 orang
- Saprodi untuk 2.253 ha
- Alsintan sebanyak 4.899 unit

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2023

Alokasi Hibah Daerah TA 2023 menyesuaikan kemajuan proyek dan batas waktu pelaksanaan program hibah.

(Dalam miliar rupiah)

URAIAN	RAPBN 2023 Nota Keuangan
Hibah kepada Pemerintah Daerah	2.077,53
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	768,72
1. <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	44,42
2. <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>	485,87
3. <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)</i>	38,38
4. <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i>	200,00
5. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/ <i>National Urban Water Supply Project (NUWSP)</i>	0,05
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	115,81
1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	39,37
2. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ <i>Palembang City Sewerage Project (PCSP)</i>	52,14
3. <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)</i>	24,30
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	1.193,00
1. <i>Nationwide Water Hibah Program</i>	750,00
2. Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat)	150,00
3. Hibah Jalan Daerah	293,00

Note:

- Hibah IPDMIP, READSI, dan AMBK NUWSP sedang dalam proses perpanjangan pinjaman.
- Hibah MRT direncanakan terdapat pinjaman baru untuk meneruskan pembangunan MRT.



TARGET OUTPUT HIBAH DAERAH TA 2023



PERTANIAN

- Pelatihan petani sebanyak 92.775 orang, pelatihan penyuluh sebanyak 3.425 orang dan saprodi sebanyak 19.600 kg benih padi (**Hibah IPDMIP**)
- Pelatihan pertanian sebanyak 27.337 orang petani, pelatihan penyadaran gizi keluarga sebanyak 18.850 keluarga, saprodi sebanyak 5.425 paket dan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebanyak 130 paket (**Hibah READ-SI**)
- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 87 km, terasering lahan seluas 357 ha, irigasi perpompaaan/irigasi air tanah sebanyak 160 unit, pengembangan irigasi perpipaan sepanjang 67 km, saprodi untuk 2.253 ha, dan alsintan sebanyak 4.899 unit (**Hibah UPLAND**)



SANITASI

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Stasiun pompa dengan capaian 100% (**Hibah IPAL Palembang/PCSP**)
- Pembangunan sanitasi layak dan aman berupa tangki septik pada 25.000 Rumah Terlayani (RT) (**Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) APBN**)



LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah sebesar 3 juta ton Co2eq, area hutan dan lahan yang dapat dikelola secara berkelanjutan seluas 260.000 ha (**Hibah BioCF ISFL**)



AIR MINUM

- Peningkatan kinerja tata kelola, efisiensi operasi, keuangan dan kualitas pelayanan di 18 BUMD Air Minum (**Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia**)
- Peningkatan kinerja efisiensi operasi di 3 BUMD Air Minum (**Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/NUWSP**)
- Pembangunan Sambungan Rumah (SR) air minum sebanyak 214.464 SR (**Hibah Air Minum APBN**)

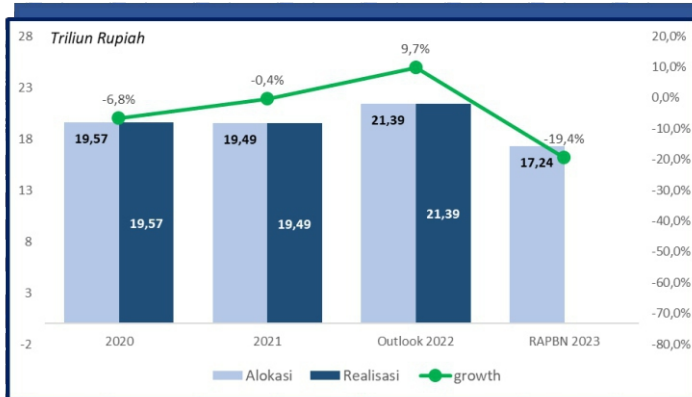


PERHUBUNGAN DAN KONEKTIVITAS

- Pembangunan jalur MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) dengan *output*/jarak ± 5,8 km (**Hibah MRT**)
- Penanganan jalan sepanjang 421,88 km (**Hibah Jalan Daerah APBN**)

PERKEMBANGAN ALOKASI DANA OTSUS & DTI DAN KEBIJAKAN TA 2023

PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALIASI



Triliun Rupiah

	2020	2021	2022	2023*)
DTI	4,45	4,37	4,37	4,37
Otsus Wilayah Papua	7,56	7,56	8,51	8,91
Otsus Aceh	7,56	7,56	7,56	3,96

*) Dana Otsus & DTI 2023 → Perhitungan Daerah Induk (sebelum dibagi ke DOB)



Kebijakan 2023

- ❑ Melanjutkan kebijakan pelaksanaan tata kelola otsus sesuai dengan UU No 2/2021, PP 106/2021 dan PP 107/2021, baik untuk pengalokasian, penggunaan maupun pembinaan.
- ❑ Mengalokasikan **Dana Otsus Aceh sebesar 1%** dari plafon DAU Nasional
- ❑ Mengalokasikan Dana Otsus dan DTI **daerah pemekaran dari alokasi daerah induk** berdasarkan proporsi Jumlah OAP, Luas Wilayah, Jumlah Kab/Kota, dan Jumlah Penduduk.
- ❑ **Memperhatikan indeks kinerja dalam pengelolaan Dana Otsus** (Silpa Dana Otsus, ketepatan waktu penyampaian rencana penggunaan (RAP), dan ketepatan waktu penetapan APBD).
- ❑ Mengalokasikan **DTI antara provinsi dan kab/kota berlandaskan BA kesepakatan** kebutuhan pembangunan infrastruktur antara provinsi dan kab/kota.



SIMULASI PERHITUNGAN PORSI DANA OTSUS & DTI UNTUK DOB DI WILAYAH PAPUA



PEMBAGIAN DANA OTSUS TA.2023

Variabel berdasarkan PP 107/2022 & PMK 76/22 - **Daerah Induk (OTSUS)**

- | | |
|--|-------------------|
| a. Jumlah OAP; | e. IKG; |
| b. Jumlah penduduk; | f. IKK; |
| c. Luas wilayah darat dan laut; | g. IPM; dan |
| d. Jumlah kab./kota, distrik, desa, dan kelurahan; | h. Indeks kinerja |

SIMULASI HASIL (Pembagian awal sebelum dibagi ke DOB)

- PAPUA : 67,31%
- PAPUA BARAT : 32,69%

PEMBAGIAN DTI TA.2023

Variabel berdasarkan PP 107/2022 & PMK 76/22 - **Daerah Induk (DTI)**

- a. Luas wilayah darat dan laut (Bobot 25%);
- b. Jumlah kab./kota (Bobot 25%);
- c. IKK (Bobot 50%).

SIMULASI HASIL (Pembagian awal sebelum dibagi ke DOB)

- PAPUA : 64,22%
- PAPUA BARAT : 35,78%

Alokasi untuk DOB untuk tahun 2023 akan dihitung secara proporsional dari TKD provinsi induk dan ditetapkan dalam Perpres rincian APBN
(Variabel : Jmlh OAP, Jmlh Penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah Kab/Kota)

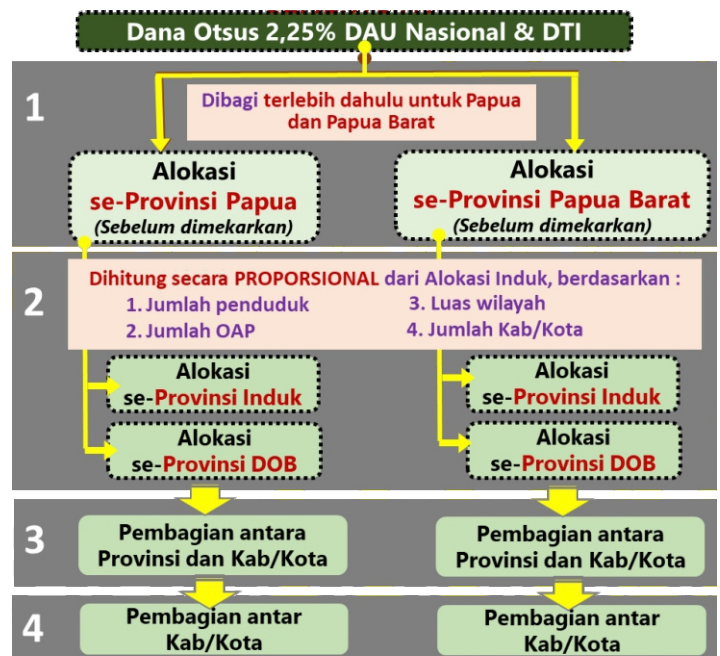
PENGALOKASIAN DANA OTSUS & DTI TA 2023 UNTUK WILAYAH PEMEKARAN

PEMBAGIAN WILAYAH PEMEKARAN (Termasuk Prov Papua Barat Daya)



Provinsi baru mendapatkan alokasi TKD dan Dana Otsus yang dibagi secara **proporsional** dari provinsi induk

PENGALOKASIAN DANA OTSUS WILAYAH

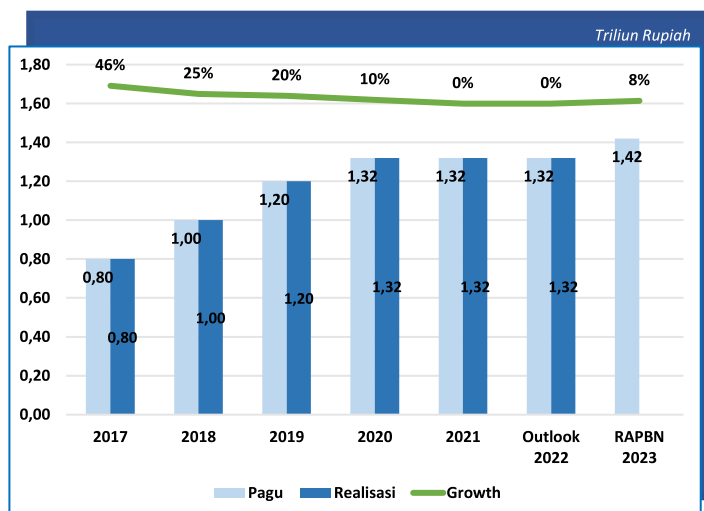




KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY 2023



PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI



Kebijakan 2023

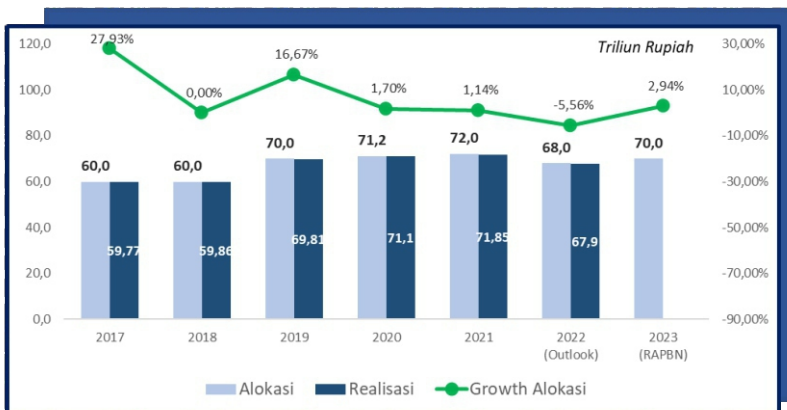
- ❑ Melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.
- ❑ Melanjutkan penguatan **sinergi kegiatan antara belanja K/L** dengan belanja Dana Keistimewaan.
- ❑ Melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
- ❑ Membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD.

Target 2023

- Optimalisasi penggunaan DAIS Rp1,42 T untuk mendanai 5 urusan Keistimewaan terutama Kebudayaan dan Tata Ruang.
- Tersosialisasikannya pemanfaatan DAIS kepada seluruh masyarakat.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2023

PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI



Target penggunaan DD 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk:



Program perlinas dan kemiskinan ekstrem BLT Desa maksimal 25%



Dana Operasional Pemerintah Desa

Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk **penanganan stunting**, mendukung **ketahanan pangan dan hewani**.



Kebijakan 2023

1. Melanjutkan kebijakan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional.
2. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan DD.
3. Menyempurnakan kebijakan penganggaran Dana Desa (DD) dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan masing-masing desa sesuai kewenangan desa.
 - b. *performance based* pengelolaan DD dan sinergi penggunaan DD melalui penilaian kinerja desa (Alokasi Kinerja).
4. Melaksanakan pengalokasian DD berdasarkan formula dan **pengalokasian sebagian DD secara terpisah pada Tahun Anggaran berjalan** berdasarkan kriteria tertentu.
5. Memperbaiki mekanisme penyaluran DD melalui:
 - a. memisahkan penyaluran DD *earmarked* dan *non earmarked*. penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD
 - b. pemberian *reward* penyaluran DD dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri.



FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2023

Pagu Rp70 T dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota

yang terdiri atas:

A

Sebesar Rp68 T pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula = AD + AA + AK + AF



Alokasi Dasar (AD) sebesar 65% (enam puluh lima persen) dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk



Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1% (satu persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.



Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Penilaian AK dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota



Alokasi Formula (AF) sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa



B

Sebesar Rp2 T dialokasikan dan disalurkan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kinerja Desa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah sesuai dinamika dan kondisi perekonomian dan keuangan negara

NEW DESIGN
PENGALOKASIAN
DD 2023



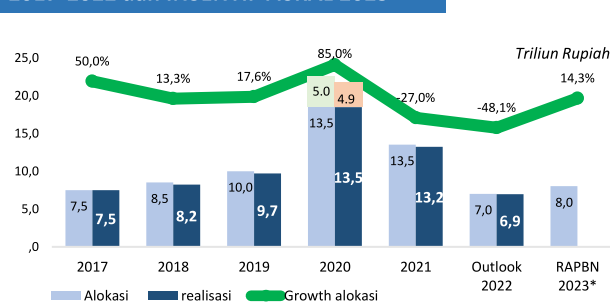
Pengalokasian dihitung dengan kriteria/kinerja tertentu, misal: kinerja Penyaluran DD TA berjalan, pemenuhan belanja wajib DD dalam APBDes (terkait penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan hewani, dsb.) dan/atau sebagai kebijakan *burden sharing*



Penyaluran dilakukan terpisah dengan penyaluran pagu berdasarkan formula reguler.

PERKEMBANGAN ALOKASI INSENTIF FISKAL DAN KEBIJAKAN TA 2023

PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALIASI DID 2017-2022 dan INSENTIF FISKAL 2023



Insentif Fiskal daerah berkinerja baik dialokasikan berdasarkan:

- Indikator Kesejahteraan** berupa tingkat kemiskinan, pengangguran, dan IPM serta **Kriteria Utama** berupa Opini LKPD dan Penetapan Perda APBD tepat waktu;
- Penilaian atas **Kategori Kinerja**

1 Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tingkat kemandirian daerah
- Interkoneksi Sistem Informasi Keu Daerah dan SAKIP

2 Pelayanan Dasar

- Stunting dan Imunisasi
- Indeks SPM Pendidikan
- Sanitasi dan Air Minum

3 Pelayanan Umum Pemerintahan

- Penghargaan atas Sinergi Kebijakan Pemda dengan Pemerintah
- Kesejahteraan Masyarakat



Kebijakan 2023

- Melanjutkan kebijakan pemberian penghargaan melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja baik dalam mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Melanjutkan mekanisme penilaian/indikator penilaian kinerja insentif fiskal **sebesar Rp8,0 T** melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 T dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 T, **dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah.**
- Mengalokasikan insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya yang diperuntukkan bagi
 - daerah berkinerja baik Rp3,0 T; dan
 - daerah tertinggal berkinerja baik Rp1,0 T;
- Kategori kinerja yang digunakan relevan dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan memperkuat sinergi kinerja pusat dan daerah.
- Penggunaan antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah termasuk infrastruktur, perlinasos, dukungan dunia usaha terutama UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.



ALOKASI TKD TA 2023

REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI PAPUA BARAT

NO.	DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS	DANA DESA	(dalam ribuan rupiah)	
									Jumlah	
1	PROVINSI PAPUA BARAT	2.856.471.331	1.259.198.372	185.544.420	84.426.421	-	1.968.445.663	-	6.354.086.207	
2	KAB. FAK FAK	119.411.707	672.684.938	102.819.285	74.464.396	-	177.093.473	117.909.373	1.264.383.172	
3	KAB. MANOKWARI	53.800.913	533.928.292	149.460.915	121.335.161	600.000	257.012.404	125.961.876	1.242.099.561	
4	KAB. SORONG	191.689.580	526.492.505	251.674.222	118.578.874	-	124.285.614	164.360.453	1.377.081.248	
5	KOTA SORONG	54.755.762	511.393.788	45.264.895	105.204.882	-	202.432.507	-	919.051.834	
6	KAB. RAJA AMPAT	114.171.662	672.765.495	176.206.428	75.774.668	-	273.818.414	91.943.383	1.404.680.050	
7	KAB. SORONG SELATAN	86.782.081	457.816.904	144.521.870	74.688.210	-	176.926.419	97.133.638	1.037.869.122	
8	KAB. TELUK BINTUNI	1.173.674.594	519.714.416	104.936.007	72.873.938	-	153.705.133	100.300.777	2.125.204.865	
9	KAB. TELUK WONDAMA	91.247.556	443.838.860	192.895.235	41.385.007	-	177.897.530	62.728.640	1.009.992.828	
10	KAB. KAIMANA	164.896.242	594.943.547	36.185.337	59.771.105	-	176.917.724	82.299.143	1.115.013.098	
11	KAB. MAYBRAT	85.262.436	421.049.520	162.299.562	50.149.829	-	230.504.098	182.297.068	1.131.562.513	
12	KAB. TAMBRAUW	86.372.084	483.430.848	173.681.488	39.199.228	-	170.289.431	161.599.447	1.114.572.526	
13	KAB. MANOKWARI SELATAN	82.061.911	336.698.688	77.661.764	33.184.604	-	140.979.295	48.343.840	718.930.102	
14	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	81.134.227	363.163.580	107.060.820	46.043.051	-	245.982.807	124.965.337	968.349.822	
JUMLAH		5.241.732.086	7.797.119.753	1.910.212.248	997.079.374	600.000	4.476.290.512	1.359.842.975	21.782.876.948	

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI PAPUA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	6.354.086.207
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	2.856.471.331
1. DBH Pajak	155.901.640
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	40.344.985
<i>b. PBB</i>	115.556.655
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.700.569.691
<i>a. Migas</i>	2.609.393.660
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	17.648.647
<i>c. Kehutanan</i>	73.527.384
<i>d. Panas Bumi</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.259.198.372
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	872.702.639
2. DAU ditentukan penggunaannya	386.495.733
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	81.903.360
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	-
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	48.491.341
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	59.074.493
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	197.026.539
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	269.970.841
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	185.544.420
<i>a. Pendidikan</i>	-
<i>b. Kesehatan</i>	34.051.755
<i>c. Jalan</i>	65.836.152
<i>d. Air Minum</i>	-
<i>e. Sanitasi</i>	-
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	30.899.487
<i>h. Pertanian</i>	17.811.976
<i>i. Kelautan dan Perikanan</i>	36.945.050
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Pariwisata</i>	-
<i>l. Transportasi Perairan</i>	-
<i>m. Transportasi Perdesaan</i>	-
<i>n. Lingkungan Hidup</i>	-
<i>o. Kehutanan</i>	-
<i>p. Perdagangan</i>	-
<i>q. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	-
<i>r. Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	84.426.421
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	1.505.180
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	69.846.312
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	9.930.966
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	-
<i>f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	1.676.063
<i>g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan</i>	-
<i>h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</i>	-
<i>i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	438.800
<i>j. Dana Fasilitas Penanaman Modal</i>	1.029.100
<i>k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	-
<i>l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
D. Dana Otonomi Khusus	1.968.445.663
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	873.718.270
<i>a. Penerimaan Umum</i>	388.319.231
<i>b. Penerimaan Berbasis Kinerja</i>	485.399.039
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	1.094.727.393

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. FAK FAK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.264.383.172
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	119.411.707
1. DBH Pajak	32.173.098
a. Pajak Penghasilan	2.722.424
b. PBB	29.450.674
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	87.238.609
a. Migas	66.472.906
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.813.225
c. Kehutanan	13.856.713
d. Perikanan	5.095.765
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	672.684.938
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	501.326.472
2. DAU ditentukan penggunaannya	171.358.466
a. Penggajian Formasi PPPK	20.404.854
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	53.171.344
d. Bidang Kesehatan	51.536.314
e. Bidang Pekerjaan Umum	44.845.954
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	177.283.681
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	102.819.285
a. Pendidikan	12.740.927
b. Kesehatan	54.293.640
c. Jalan	27.906.972
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	7.877.746
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	74.464.396
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	30.479.170
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	24.095.536
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	13.468.371
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.973.402
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	959.717
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	438.200
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	452.000
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	177.093.473
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	139.782.270
a. Penerimaan Umum	62.125.453
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	77.656.817
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	37.311.203
E. Dana Desa	117.909.373

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
KAB. MANOKWARI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.242.099.561
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	53.800.913
1. DBH Pajak	19.238.783
a. Pajak Penghasilan	11.213.707
b. PBB	8.025.076
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	34.562.130
a. Migas	28.577.781
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.824.933
c. Kehutanan	1.872.126
d. Perikanan	2.287.290
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	533.928.292
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	394.629.762
2. DAU ditentukan penggunaannya	139.298.530
a. Penggajian Formasi PPPK	11.516.190
b. Pendanaan Kelurahan	1.800.000
c. Bidang Pendidikan	55.155.989
d. Bidang Kesehatan	39.258.650
e. Bidang Pekerjaan Umum	31.567.701
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	271.396.076
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	149.460.915
a. Pendidikan	55.662.301
b. Kesehatan	17.672.031
c. Jalan	52.763.061
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	7.017.501
k. Pariwisata	4.496.527
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	7.100.000
n. Lingkungan Hidup	4.749.494
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	121.335.161
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	57.884.080
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	28.916.613
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.749.356
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.808.419
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	406.770
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.329.523
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	490.400
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000
3. Hibah ke Daerah	600.000
D. Dana Otonomi Khusus	257.012.404
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	232.951.759
a. Penerimaan Umum	103.534.115
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	129.417.644
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	24.060.645
E. Dana Desa	125.961.876

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
KAB. SORONG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.377.081.248
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	191.689.580
1. DBH Pajak	89.035.846
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	6.365.833
<i>b. PBB</i>	82.670.013
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	102.653.734
<i>a. Migas</i>	78.174.281
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	15.956.382
<i>c. Kehutanan</i>	4.651.937
<i>d. Perikanan</i>	3.871.134
<i>e. Panas Bumi</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	526.492.505
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	324.789.641
2. DAU ditentukan penggunaannya	201.702.864
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	53.333.676
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	5.200.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	47.863.207
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	43.905.272
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	51.400.709
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	370.253.096
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	251.674.222
<i>a. Pendidikan</i>	31.244.530
<i>b. Kesehatan</i>	96.465.520
<i>c. Jalan</i>	82.187.924
<i>d. Air Minum</i>	-
<i>e. Sanitasi</i>	-
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	5.721.339
<i>h. Pertanian</i>	513.143
<i>i. Kelautan dan Perikanan</i>	5.630.685
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	9.174.989
<i>k. Pariwisata</i>	2.402.161
<i>l. Transportasi Perairan</i>	6.658.374
<i>m. Transportasi Perdesaan</i>	9.307.388
<i>n. Lingkungan Hidup</i>	2.368.169
<i>o. Kehutanan</i>	-
<i>p. Perdagangan</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	118.578.874
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	39.277.130
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	42.673.570
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	24.000.903
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	5.913.471
<i>f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	457.770
<i>g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan</i>	1.769.730
<i>h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</i>	-
<i>i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
<i>j. Dana Fasilitas Penanaman Modal</i>	511.300
<i>k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	475.000
<i>l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	3.500.000
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	124.285.614
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	100.984.310
<i>a. Penerimaan Umum</i>	44.881.916
<i>b. Penerimaan Berbasis Kinerja</i>	56.102.394
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	23.301.304
E. Dana Desa	164.360.453

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
KOTA SORONG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	919.051.834
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	54.755.762
1. DBH Pajak	17.066.521
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	10.708.353
<i>b. PBB</i>	6.358.168
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	37.689.241
<i>a. Migas</i>	32.352.960
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	1.813.837
<i>c. Kehutanan</i>	1.896.102
<i>d. Perikanan</i>	1.626.342
<i>e. Panas Bumi</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	511.393.788
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	399.266.461
2. DAU ditentukan penggunaannya	112.127.327
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	20.635.308
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	8.200.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	39.836.208
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	36.155.811
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	7.300.000
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.469.777
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.264.895
<i>a. Pendidikan</i>	14.448.404
<i>b. Kesehatan</i>	10.394.719
<i>c. Jalan</i>	13.490.669
<i>d. Air Minum</i>	-
<i>e. Sanitasi</i>	-
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	-
<i>h. Pertanian</i>	-
<i>i. Kelautan dan Perikanan</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	1.393.546
<i>k. Pariwisata</i>	4.787.637
<i>l. Transportasi Perairan</i>	-
<i>m. Transportasi Perdesaan</i>	-
<i>n. Lingkungan Hidup</i>	749.920
<i>o. Kehutanan</i>	-
<i>p. Perdagangan</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	105.204.882
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	55.244.110
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	26.599.488
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	16.385.897
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	2.356.690
<i>f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	420.370
<i>g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan</i>	1.749.627
<i>h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</i>	-
<i>i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
<i>j. Dana Fasilitas Penanaman Modal</i>	448.700
<i>k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	-
<i>l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	2.000.000
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	202.432.507
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	190.603.397
<i>a. Penerimaan Umum</i>	84.712.621
<i>b. Penerimaan Berbasis Kinerja</i>	105.890.776
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	11.829.110
E. Dana Desa	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
KAB. RAJA AMPAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.404.680.050
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	114.171.662
1. DBH Pajak	20.636.768
a. Pajak Penghasilan	2.467.506
b. PBB	18.169.262
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	93.534.894
a. Migas	32.352.960
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	40.058.941
c. Kehutanan	1.917.364
d. Perikanan	19.205.629
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	672.765.495
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	372.549.474
2. DAU ditentukan penggunaannya	300.216.021
a. Penggajian Formasi PPPK	80.609.064
b. Pendanaan Kelurahan	800.000
c. Bidang Pendidikan	94.979.966
d. Bidang Kesehatan	58.390.232
e. Bidang Pekerjaan Umum	65.436.759
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	251.981.096
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	176.206.428
a. Pendidikan	32.607.284
b. Kesehatan	26.791.859
c. Jalan	70.786.744
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.284.513
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	9.394.293
j. Industri Kecil dan Menengah	4.976.951
k. Pariwisata	4.461.855
l. Transportasi Perairan	9.489.586
m. Transportasi Perdesaan	9.992.655
n. Lingkungan Hidup	3.420.688
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	75.774.668
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	28.352.820
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	14.015.092
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.678.622
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.260.307
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.532.027
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	427.800
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	383.000
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	273.818.414
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	210.808.717
a. Penerimaan Umum	93.692.763
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	117.115.954
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	63.009.697
E. Dana Desa	91.943.383

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. SORONG SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.037.869.122
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	86.782.081
1. DBH Pajak	9.531.134
a. Pajak Penghasilan	2.018.981
b. PBB	7.512.153
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	77.250.947
a. Migas	70.248.086
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.813.225
c. Kehutanan	2.809.777
d. Perikanan	2.379.859
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	457.816.904
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	273.447.674
2. DAU ditentukan penggunaannya	184.369.230
a. Penggajian Formasi PPPK	25.852.536
b. Pendanaan Kelurahan	400.000
c. Bidang Pendidikan	53.613.983
d. Bidang Kesehatan	32.779.234
e. Bidang Pekerjaan Umum	71.723.477
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	219.210.080
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	144.521.870
a. Pendidikan	33.321.428
b. Kesehatan	68.821.800
c. Jalan	35.747.848
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	6.630.794
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	74.688.210
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	21.507.440
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	26.903.285
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	21.759.125
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.256.990
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	420.370
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	469.500
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	371.500
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	176.926.419
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	138.411.844
a. Penerimaan Umum	61.516.375
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	76.895.469
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	38.514.575
E. Dana Desa	97.133.638

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. TELUK BINTUNI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.125.204.865
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	1.173.674.594
1. DBH Pajak	440.194.570
a. Pajak Penghasilan	22.747.487
b. PBB	417.447.083
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	733.480.024
a. Migas	709.862.189
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.813.225
c. Kehutanan	18.076.190
d. Perikanan	3.728.420
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	519.714.416
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	300.163.101
2. DAU ditentukan penggunaannya	219.551.315
a. Penggajian Formasi PPPK	58.106.466
b. Pendanaan Kelurahan	400.000
c. Bidang Pendidikan	43.780.836
d. Bidang Kesehatan	40.261.869
e. Bidang Pekerjaan Umum	77.002.144
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	177.809.945
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	104.936.007
a. Pendidikan	26.730.080
b. Kesehatan	78.205.927
c. Jalan	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	-
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	72.873.938
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	33.187.220
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	11.690.978
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.448.114
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.787.926
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	365.200
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	394.500
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	153.705.133
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	119.737.807
a. Penerimaan Umum	53.216.803
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	66.521.004
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	33.967.326
E. Dana Desa	100.300.777

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. TELUK WONDAMA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.009.992.828
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	91.247.556
1. DBH Pajak	10.228.115
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	2.033.847
<i>b. PBB</i>	8.194.268
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	81.019.441
<i>a. Migas</i>	66.472.906
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	1.813.225
<i>c. Kehutanan</i>	8.002.538
<i>d. Perikanan</i>	4.730.772
<i>e. Panas Bumi</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	443.838.860
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	309.447.950
2. DAU ditentukan penggunaannya	134.390.910
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	6.708.048
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	200.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	48.167.399
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	43.999.959
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	35.315.504
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.280.242
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	192.895.235
<i>a. Pendidikan</i>	17.317.823
<i>b. Kesehatan</i>	96.433.762
<i>c. Jalan</i>	49.401.094
<i>d. Air Minum</i>	-
<i>e. Sanitasi</i>	-
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	-
<i>h. Pertanian</i>	-
<i>i. Kelautan dan Perikanan</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	1.555.434
<i>k. Pariwisata</i>	12.217.281
<i>l. Transportasi Perairan</i>	-
<i>m. Transportasi Perdesaan</i>	12.999.189
<i>n. Lingkungan Hidup</i>	2.970.652
<i>o. Kehutanan</i>	-
<i>p. Perdagangan</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	41.385.007
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	14.703.640
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	7.988.180
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	10.265.694
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	3.043.863
<i>f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan</i>	1.934.530
<i>h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</i>	-
<i>i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	438.800
<i>j. Dana Fasilitas Penanaman Modal</i>	500.800
<i>k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	509.500
<i>l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	2.000.000
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	177.897.530
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	139.058.268
<i>a. Penerimaan Umum</i>	61.803.675
<i>b. Penerimaan Berbasis Kinerja</i>	77.254.593
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	38.839.262
E. Dana Desa	62.728.640

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. KAIMANA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.115.013.098
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	164.896.242
1. DBH Pajak	13.023.059
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	2.337.358
<i>b. PBB</i>	10.685.701
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	151.873.183
<i>a. Migas</i>	66.472.906
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	63.304.029
<i>c. Kehutanan</i>	16.168.576
<i>d. Perikanan</i>	5.927.672
<i>e. Panas Bumi</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	594.943.547
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	377.716.454
2. DAU ditentukan penggunaannya	217.227.093
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	35.213.412
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	400.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	86.702.777
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	52.613.042
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	42.297.862
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	95.956.442
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.185.337
<i>a. Pendidikan</i>	7.628.831
<i>b. Kesehatan</i>	5.527.025
<i>c. Jalan</i>	14.789.413
<i>d. Air Minum</i>	-
<i>e. Sanitasi</i>	-
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	-
<i>h. Pertanian</i>	-
<i>i. Kelautan dan Perikanan</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Pariwisata</i>	-
<i>l. Transportasi Perairan</i>	-
<i>m. Transportasi Perdesaan</i>	8.240.068
<i>n. Lingkungan Hidup</i>	-
<i>o. Kehutanan</i>	-
<i>p. Perdagangan</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	59.771.105
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	23.538.210
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	20.436.797
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	12.789.591
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	2.000.232
<i>f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan</i>	-
<i>h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</i>	-
<i>i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
<i>j. Dana Fasilitas Penanaman Modal</i>	438.200
<i>k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	568.075
<i>l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	176.917.724
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	132.805.854
<i>a. Penerimaan Umum</i>	59.024.824
<i>b. Penerimaan Berbasis Kinerja</i>	73.781.030
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	44.111.870
E. Dana Desa	82.299.143

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. MAYBRAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.131.562.513
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	85.262.436
1. DBH Pajak	9.022.410
a. Pajak Penghasilan	1.930.664
b. PBB	7.091.746
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	76.240.026
a. Migas	70.248.086
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.813.225
c. Kehutanan	2.838.351
d. Perikanan	1.340.364
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	421.049.520
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	276.486.235
2. DAU ditentukan penggunaannya	144.563.285
a. Penggajian Formasi PPPK	774.822
b. Pendanaan Kelurahan	200.000
c. Bidang Pendidikan	16.793.342
d. Bidang Kesehatan	32.996.377
e. Bidang Pekerjaan Umum	93.798.744
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	212.449.391
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	162.299.562
a. Pendidikan	19.266.880
b. Kesehatan	99.706.775
c. Jalan	33.009.090
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	10.316.817
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	50.149.829
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	7.154.830
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	17.359.334
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19.815.214
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.938.751
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	521.700
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	360.000
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	230.504.098
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	186.708.328
a. Penerimaan Umum	82.981.479
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	103.726.849
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	43.795.770
E. Dana Desa	182.297.068

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
KAB. TAMBRAUW

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.114.572.526
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	86.372.084
1. DBH Pajak	8.471.123
a. Pajak Penghasilan	1.613.627
b. PBB	6.857.496
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	77.900.961
a. Migas	70.248.086
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.813.225
c. Kehutanan	2.882.292
d. Perikanan	2.957.358
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	483.430.848
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	287.826.257
2. DAU ditentukan penggunaannya	195.604.591
a. Penggajian Formasi PPPK	15.187.308
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	49.769.723
d. Bidang Kesehatan	41.153.188
e. Bidang Pekerjaan Umum	89.494.372
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	212.880.716
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	173.681.488
a. Pendidikan	31.268.556
b. Kesehatan	69.009.079
c. Jalan	57.199.319
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	3.449.415
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	11.400.000
n. Lingkungan Hidup	1.355.119
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	39.199.228
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	10.776.480
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	11.483.591
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.839.648
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.102.389
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.162.220
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	417.400
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	417.500
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	170.289.431
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	121.404.625
a. Penerimaan Umum	53.957.611
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	67.447.014
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	48.884.806
E. Dana Desa	161.599.447

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. MANOKWARI SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	718.930.102
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	82.061.911
1. DBH Pajak	8.464.699
a. Pajak Penghasilan	1.928.279
b. PBB	6.536.420
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	73.597.212
a. Migas	66.472.906
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.813.225
c. Kehutanan	3.444.921
d. Perikanan	1.866.160
e. Panas Bumi	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	336.698.688
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	237.497.645
2. DAU ditentukan penggunaannya	99.201.043
a. Penggajian Formasi PPPK	10.159.524
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	31.630.001
d. Bidang Kesehatan	27.266.024
e. Bidang Pekerjaan Umum	30.145.494
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	110.846.368
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.661.764
a. Pendidikan	25.955.740
b. Kesehatan	2.091.287
c. Jalan	37.111.811
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	12.502.926
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	33.184.604
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	11.940.410
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	3.321.822
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.855.652
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.117.695
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	480.000
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	469.025
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	140.979.295
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	124.413.750
a. Penerimaan Umum	55.295.000
b. Penerimaan Berbasis Kinerja	69.118.750
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	16.565.545
E. Dana Desa	48.343.840

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
KAB. PEGUNUNGAN ARFAK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	968.349.822
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	81.134.227
1. DBH Pajak	9.029.129
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	1.708.027
<i>b. PBB</i>	7.321.102
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	72.105.098
<i>a. Migas</i>	66.472.906
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	1.813.225
<i>c. Kehutanan</i>	2.478.603
<i>d. Perikanan</i>	1.340.364
<i>e. Panas Bumi</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	363.163.580
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	215.848.681
2. DAU ditentukan penggunaannya	147.314.899
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	1.825.608
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	-
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	37.261.747
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	23.769.902
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	84.457.642
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.103.871
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.060.820
<i>a. Pendidikan</i>	37.084.091
<i>b. Kesehatan</i>	18.228.371
<i>c. Jalan</i>	40.801.645
<i>d. Air Minum</i>	-
<i>e. Sanitasi</i>	-
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	-
<i>h. Pertanian</i>	-
<i>i. Kelautan dan Perikanan</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Pariwisata</i>	-
<i>l. Transportasi Perairan</i>	-
<i>m. Transportasi Perdesaan</i>	10.946.713
<i>n. Lingkungan Hidup</i>	-
<i>o. Kehutanan</i>	-
<i>p. Perdagangan</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	46.043.051
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	16.017.580
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	6.501.694
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	19.554.918
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	3.066.259
<i>f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>g. Dana Pelayanan Kepariwisataaan</i>	-
<i>h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</i>	-
<i>i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
<i>j. Dana Fasilitas Penanaman Modal</i>	542.600
<i>k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	360.000
<i>l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
3. Hibah ke Daerah	-
D. Dana Otonomi Khusus	245.982.807
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	201.005.037
<i>a. Penerimaan Umum</i>	89.335.572
<i>b. Penerimaan Berbasis Kinerja</i>	111.669.465
2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua	44.977.770
E. Dana Desa	124.965.337

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH T.A 2023

PEMBINA	:	Luky Alfirman,	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Mariatul Aini, 2. Adriyanto, 3. Purwanto, 4. Bhimantara Widyajala, 5. Agung Widiadi,	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi
KETUA	:	Siti Mulyanah,	Kepala Subdirektorat Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Ch. Nelly Gustiarti, Kindy Rinaldy Syahrir, Edi Soeprijono, Yuni Ariani, Mauliate Harnalyes Silitonga, Hendra Gunawan, Ilham Hadiana, Ricka Yunita Prasetya, Nanag Garendra Timur, Herry Prananto, Ana Fitriah, Lafif Nur Imam, Novi Liani Dewi Wulandari, Gagah Aradika, Saeful, Achmad Irzan, Arif Novianto, Endah Pusparini, Ryan Andhika Wahyu Putra, Jatmiko Ikhsani, Desy Puspita Anggraeni, Hantony Muharman, Dzulfizar Ghooziyarrahman, Rezam Hanenda Raymuna, Mario Agustino, Intan Nur Shabrina.	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. SUBDIREKTORAT DANA BAGI HASIL 2. SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI UMUM 3. SUBDIREKTORAT DANA INSENTIF DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN 4. SUBDIREKTORAT DANA DESA 5. SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SEKTOR PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN 6. SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 7. SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK	



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Radius Prawiro
Jakarta Pusat



BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
Gedung Radius Prawiro
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta - 10710
www.djpk.kemenkeu.go.id